

## ISLAM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI INDONESIA: DARI MASJID HINGGA FENOMENA SOSIAL KEAGAMAAN

**Zaenudin Amrulloh**

Universitas Islam Negeri Mataram

[amrulloh@uinmataram.ac.id](mailto:amrulloh@uinmataram.ac.id)

**Abstract:** *Violent incidents involving mosques are not new in Indonesia. There are a number of incidents that illustrate how a mosque that should be a safe and comfortable place can invisibly breed violence. On March 3, 2011, the Governor of West Java issued Peraturan Gubernur No. 12 Tahun 2011 concerning the prohibition of activities of the Ahmadiyah congregation in West Java. In the press, the governor stated by issuing several statements related to Ahmadiyah referring to the Perbug: (1) all Ahmadiyah attributes installed in mosques must be immediately removed and the mosque which was formerly called the Ahmadiyah Mosque will be declared a joint mosque that may be used by Muslims; (2) The Ahmadiyah congregation must be willing to receive guidance to stop deviations from the interpretation of the activities of the Ahmadiyah Community in the form of spreading interpretations and activities that deviate from the main teachings of the Islamic religion.*

**Abstrak:** Peristiwa-peristiwa kekerasan yang melibatkan masjid bukanlah hal baru di Indonesia. Terdapat sejumlah peristiwa yang menggambarkan bagaimana masjid yang seharusnya sebagai tempat yang aman dan nyaman justru secara tidak kasat mata dapat melahirkan kekerasan. Pada tanggal 3 Maret 2011, Gubernur Jawa Barat mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2011 tentang pelarangan Kegiatan jamaah Ahmadiyah di Jawa Barat. Dalam pers gubernur menyatakan dengan mengeluarkan beberapa pernyataan terkait Ahmadiyah yang mengacu pada Perbug tersebut: (1) seluruh atribut Ahmadiyah yang terpasang di masjid harus segera dicopot dan masjid yang dulunya disebut Masjid Ahmadiyah akan dinyatakan sebagai masjid bersama yang boleh digunakan oleh kaum muslimin; (2) jemaat Ahmadiyah harus mau menerima pembinaan untuk menghentikan penyimpangan penafsiran aktivitas Jemaat Ahmadiyah berupa kegiatan penyebaran penafsiran dan aktivitas yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam maka wajib melaporkan kepada aparat kepolisian.

**Keywords:** *Pemberdayaan Masyarakat, Masjid, Sosial Keagamaan*



## PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara dengan penganut agama Islam terbesar di dunia, disusul secara berturut-turut oleh Pakistan, India, Bangladesh, dan Turki. Di Indonesia sendiri perkembangan Islam sudah dapat dilihat jauh dari sebelum Indonesia merdeka. Berdirinya ormas-ormas Islam juga faktanya berkembang jauh sebelum Indonesia merdeka. Ormas-Ormas Islam ini berkembang melintasi zaman mulai dari prakolonialisme hingga ke zaman kemerdekaan Indonesia. Juga melintasi banyak era politik yang berkembang secara khusus di Indonesia, dari era Orde Lama, Pembangunan Orde Baru, hingga ke era Demokrasi Reformasi sekarang. Juga hal yang pasti dibuktikan dengan lahirnya banyak warna ormas Islam di Indonesia adalah kontribusinya yang besar bagi perkembangan politik maupun budaya di Indonesia.

Masjid, dakwah Islam, dan pemberdayaan masyarakat bagaikan satu kesinambungan yang sebenarnya tidak dapat kita pisahkan. Dalam hal ini kita akan melihat dakwah Islam dengan sifat Islam yang lokalitas sekaligus universalitas. Islam sebagai agama yang tumbuh besar hingga saat ini dipengaruhi oleh salah satunya yaitu sifat multitafsir. Kita bisa menjumpai Islam dengan watak sosio-kulturalnya yang berbeda menurut wilayah di mana ia berkembang. Kita tidak lagi heran melihat watak Islam di Arab berbeda dengan Islam di Indonesia, hal ini disebabkan oleh (salah satunya) adanya perbedaan dalam menafsirkan Islam oleh para penganut (bisa dalam skala negara-bangsa) atau para tokoh penting yang memberikan nilai dan menginternalisasikan nilai-nilai Islam kepada masyarakat.

Sebagaimana yang bisa kita lihat bahwa Islam berkembang di Arab dan berkembang di Indonesia meskipun Islam yang diyakini itu wujudnya adalah satu, namun output-nya bisa berbeda. Kita dapat memulai untuk melihatnya pada ranah simbol, yang mana simbol-simbol Islam yang berkembang di Arab dan berkembang di Indonesia itu berbeda. Muslim Indonesia bisa digambarkan dengan atribusi keagamaannya seperti peci, baju koko, dan sarung. Sedangkan di Arab, kita akan secara dominan menjumpai muslim yang menggunakan sorban dan jubah putihnya. Kemudian pada ranah ideologi praktik, muslim di Indonesia secara umum menggabungkan tradisi dan adat dengan nilai Islam sebagai contoh tahlilan. Sedangkan di Arab, kita tidak menjumpai tahlilan.

Islam dengan lokalitas artinya bahwa nilai-nilai Islam yang muncul dari inti sumber ajarannya yaitu Al-Quran dan hadis atau secara sederhana disebut dengan syariat (syara' atau hukum Islam) yang diterapkan oleh komunitas muslim di daerah-daerah tertentu dengan agenda merekonstruksi nilai-nilai Islam berdasarkan keyakinan, pengetahuan, ajaran, atau realitas keagamaannya. Agenda ini yang tidak menutup kemungkinan melahirkan ciri dan watak Islam yang berbeda dengan negara-bangsa lainnya.

Sedangkan nilai universalitasnya terletak pada penerimaan komunitas muslim oleh dunia global terhadap nilai-nilai ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan hadis. Atau dengan sederhana, dunia secara global mengakui bahwa adanya komunitas muslim yang berkembang menurut ajarannya dan kepercayaannya. Universalitas ini yang memungkinkan Islam secara politik memiliki setir-nya sendiri yang mana arah dan tujuannya bisa menyesuaikan diri dengan kepentingan global—

dari masa ke masa, selama berabad-abad Islam tetap berdiri tegak di tengah revolusi-revolusi yang pernah terjadi di dunia.

Jadul Maula (2019: 68) berpendapat dalam hal sifat lokalitas sekaligus universalitas Islam setidaknya ada dua hal. Pertama, tentang fakta bagaimana Al-Quran menjadi suatu wilayah pemikiran, persaingan, dan perlombaan yang produktif untuk agenda mengkonstruksi dan merekonstruksi keyakinan, ajaran, pengetahuan, dan realitas keagamaan sejak dahulu bahkan sampai sekarang. Kedua, tentang fakta bagaimana lokalitas menjadi salah satu justifikasi dan dimenangkan dalam keterbukaan ijtihad atau perlombaan tersebut.

Pemberdayaan masyarakat jika menggandeng term Islam sebagai landasan ideologi dan praktiknya juga harus mampu menyesuaikan diri, sebagaimana Islam menyesuaikan dirinya terhadap zaman. Islam berkembang sekaligus bertahan hingga abad ke-20 karena kemampuan umat muslim mengkonstruksi dan merekonstruksi Islam dan budaya. Pengembangan masyarakat Islam misalnya, merupakan wujud dakwah yang dikembangkan oleh aktor dengan model dan pendekatan akademik dengan menggunakan metode dakwah sebagai suatu seruan kepada umat untuk kembali pada akhlakul karimah (moral-etika yang baik) dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa (memanusiakan manusia).

Jika melihat secara sosiologis terhadap Islam di Indonesia kita akan menjumpai beberapa aspek menarik baik secara kuantitatif dan kualitatif. Kemudian, yang paling mudah dibaca adalah pada aspek kuantitatifnya, populasi umat Islam Indonesia menempatkan dirinya sebagai posisi puncak dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Pada tahun 2011, The Pew Research Center's Religion & Public Life Project mempublikasikan *The Future of the Global Muslim Population: Projection for 2010-2030*. Menurut publikasi ini, dari 10 negara yang berpenduduk mayoritas Islam yaitu Indonesia, Pakistan, India, Bangladesh, Mesir, Nigeria, Iran, Turki, Aljazair, dan Maroko, Indonesia menempati peringkat teratas setidaknya sampai pada tahun 2029.

Kemudian dalam aspek kualitatif, kita dapat melihatnya pada keragaman umat Islam. Dengan jumlah yang besar tersebut juga dengan karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan (archipelagic state), di samping Indonesia yang memiliki kesatuan identitas tetapi pada bagian yang lain kita jumpai banyak perbedaan dan keragaman—meskipun Indonesia memiliki Bineka Tunggal Ika. Keragaman yang ada pada Indonesia tidak bisa dianggap remeh. Indonesia adalah negara dengan manajemen konflik agama terbaik di dunia, yang artinya bahwa setiap konflik masalah keagamaan di Indonesia yang dilatarbelakangi oleh perbedaan (baik ideologi atau aksiologi) tidak pernah menimbulkan chaos. G30S/PKI itu meskipun mengorbankan ulama, namun konflik ini tidak dilatarbelakangi secara murni oleh kepentingan agama namun dilatarbelakangi oleh kepentingan politik kekuasaan.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Penelitian deskriptif merupakan suatu metode penelitian yang

menggambarkan semua data atau keadaan subjek atau objek penelitian kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya dan dapat memberikan informasi yang mutakhir sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah. penelitian deskriptif secara garis besar merupakan kegiatan penelitian yang hendak membuat gambaran atau mencoba mencerna suatu peristiwa atau gejala secara sistematis, faktual dengan penyusunan yang akurat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Tipologi masjid di Indonesia dibagi berdasarkan jenis, fungsi, dan wilayahnya. Masjid Negara, masjid yang berada di Ibu Kota Negara Indonesia, masjid ini berperan dalam menjadi pusat kegiatan keagamaan tingkat kenegaraan. Masjid Nasional, masjid yang berada di Ibu Kota Provinsi yang ditetapkan oleh Menteri Agama sebagai Masjid Nasional dan menjadi pusat kegiatan keagamaan tingkat Pemerintah Provinsi. Masjid Raya, masjid yang berada di Ibu Kota Provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur atas rekomendasi Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi sebagai Masjid Raya dan masjid ini berperan sebagai pusat kegiatan keagamaan tingkat provinsi. Kemudian Masjid Agung, masjid yang berada di Ibu Kota Kabupaten/Kota, ditetapkan oleh Bupati/Walikota atas rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, masjid ini berfungsi sebagai pusat kegiatan sosial keagamaan pemerintah dan masyarakat muslim di wilayah kabupaten/kota.

Pemberdayaan masyarakat dapat menjadi agenda dakwah Islam, berarti melihat sengkabut permasalahan Islam yang dilatarbelakangi oleh buruknya manajemen dakwah yang diterapkan. Kita meyakini Islam mampu bertahan hingga saat ini dilatarbelakangi oleh manajemen dakwah yang efektif dan efisien. Fenomena dakwah Islam dari masa ke masa dapat dijabarkan melalui tiga fase pengalaman. Pengalaman pertama yaitu fase kenabian, pada fase ini dakwah Islam mulai lahir ke dunia dan dikembangkan langsung oleh Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wassalam, sebagai nabi penutup zaman. Muhammad memperkenalkan dakwah Islam sebagai upaya pembebasan manusia dari belenggu kebodohan dan kesesatan. Penduduk Makkah terbebas dari sistem yang memiskinkan yaitu berhala, dan penduduk Madinah menerima perbedaan dengan mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Anshar.

Kemudian selanjutnya, fase Kekhalifahan Rasyidin. Setelah wafatnya Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wassalam, kepemimpinannya digantikan oleh "para sahabat" dan pemilihan kepemimpinan dilaksanakan dengan menggunakan sistem musyawarah. Pada fase ini kita dapat belajar akan arti dakwah yang mementingkan suara bersama (kepentingan bersama), dalam artian bahwa nilai Islam akan diwakilkan oleh pengalaman dan pengetahuan pemimpin yang terpilih. Dan fase ketiga, yaitu fase nation-state (daulah) yang berlaku hingga saat ini. Pada fase ini perkembangan dakwah Islam dipengaruhi oleh peran penting negara (kerajaan atau republik).

Perkembangan dakwah Islam di Indonesia telah melalui banyak pengalaman sejak era kemerdekaan hingga era reformasi. Namun yang paling fenomenal adalah pengalaman Islam pasca jatuhnya rezim Orde Baru pada 1998 yaitu dengan munculnya kelompok keagamaan yang berhaluan keras (*hardliners*).

Menurut Syamsul Arifin (2015: 27-28) kejatuhan rezim Orde Baru pada 1998 perubahan fenomenal dalam konteks Indonesia kontemporer memberikan peluang munculnya berbagai kelompok keagamaan yang berhaluan keras (*hardliners*). Kelompok keagamaan yang pada mulanya bergerak di bawah tanah (*underground*), atau setidaknya berkembang di kalangan terbatas, pada saat kejatuhan rezim Orde Baru muncul secara lebih terbuka untuk memperkuat basis massa dan memperluas jaringannya. Salah satu kelompok yang memanfaatkan kejatuhan rezim Orde Baru adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). HTI sebenarnya bukan kelompok keagamaan lokal (*home grown*), tetapi merupakan bagian dari jejaring Hizbut Tahrir (HT) yang telah berkembang melintasi batas-batas negara sehingga dikatakan sebagai gerakan Islam transnasional. Dan Tidak hanya HTI beberapa kelompok keagamaan yang dimaksud di antaranya adalah Laskar Jihad, Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Front Pembela Islam (FPI), Hammas, dan Jundullah.

Kekerasan yang dilatarbelakangi oleh Islam telah menjadi aib bagi kita, bangsa Indonesia. Banyak kita jumpai saat ini kekerasan verbal dipertontonkan melalui mimbar-mimbar masjid. Dengan ukuran kuantitatif seharusnya Islam Indonesia begitu kuat, namun sebaliknya kita sering kali menonton aksi-aksi kekerasan yang dilatarbelakangi oleh agama seperti terorisme, pembakaran tempat ibadah, sampai ke pembunuhan tokoh agama. Pemberdayaan masyarakat berbasis masjid dalam hal ini sebenarnya bisa berwujud sebagai agenda pembaharuan pemikiran Islam di Indonesia. Meski pun pendekatan pembaharuan pemikiran Islam di Indonesia sudah lama menjadi perbincangan di organisasi pusaran utama umat Islam yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

Agama bagi Indonesia adalah hal yang sangat fundamental terutama dalam hal keyakinan. Terlebih masjid, bagi banyak komunitas muslim sebagai ornamen suci yang hampir sekali nilai-nilai yang termuat dalam ‘masjid’ tidak mudah untuk dievaluasi, apalagi untuk dirubah. Bagi bangsa Indonesia, secara empiris atau kenyataan Islam merupakan agama bagian terbesar rakyat. Karena itu sifat-sifat yang diterbitkan oleh agama Islam, akan mempunyai pengaruh besar bagi proses perwujudan perubahan sosial. Perubahan sosial di Indonesia, peranan Islam akan diwujudkan dalam dua sikap: menopang atau merintangi.

Manusia sebagai makhluk sosial akan menghadapi keharusan yang tidak bisa ia tolak, yaitu perubahan sosial. Mengenai perubahan sosial terdapat beberapa pendapat yang secara sederhana dibagi menjadi: perubahan sosial sebagai upaya rekayasa dan perubahan sosial sebagai suatu fenomena alamiah. Kedua pilihan dalam perubahan sosial ini tentu bisa kita terima dengan baik, karena masing-masing definisi tersebut memiliki bukti ilmiah sekaligus bukti empiris.

Perubahan sosial yang terjadi melalui rekayasa, misalnya dapat kita ambil contoh dari pengalaman-pengalaman revolusi yang terjadi di dunia, seperti pada pengalaman Perang Dunia II. Perang ini dilandasi oleh kepentingan kelompok yang memiliki tujuan politik tertentu. Setelah Perang Dunia II, kita mengenal istilah revolusi

industri dan wacana tersebut pada akhirnya mengubah cara hidup dan cara berpikir manusia di seluruh negara sehingga tanda dari perubahan sosial yang merupakan suatu upaya rekayasa yaitu melalui fenomena-fenomena revolusi.

Terutama dalam pembentukan dunia modern (yang diasiasi dengan perubahan sosial), sejarah interaksi di antara suku-suku bangsa yang berbeda secara mendasarlah yang membentuk dunia modern melalui penaklukan, wabah penyakit, dan genosida. Benturan-benturan ini menimbulkan akibat yang sampai berabad-abad kemudian belum juga mereda dan masih berkelanjutan secara aktif di beberapa bagian dunia yang paling bergejolak dewasa ini (baca Jared Diamond, 2016).

Agus Salim (2014: 1) menyebutkan bahwa perubahan sosial adalah suatu bentuk peradaban umat manusia akibat adanya eskalasi perubahan alam, biologi, fisik yang terjadi sepanjang kehidupan manusia. Dari definisi ini kita memahami bahwa perubahan sosial merupakan suatu keniscayaan akibat dari perambatan atau perubahan alam yang memaksa manusia sebagai makhluk sosial harus menyesuaikan diri. Contoh sederhana dari tipe perubahan sosial ini adalah perubahan dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern.

Perubahan sosial yang terjadi secara alamiah juga ditandai dengan perbedaan cara suku-suku bangsa di belahan dunia melakukan interaksi sosial dan politik. Para ahli sejarah merangkum beberapa fase yang dihadapi oleh manusia dalam menjalankan kehidupannya di muka bumi ini, secara sederhana fase tersebut dapat dijabarkan melalui beberapa fase. Misalnya, dari manusia primitif ke manusia modern atau dari suku pemburu-pengumpul ke manusia industri.

Sejarah selalu bergerak sesuai dengan kehendak manusia dan lingkungannya yang berarti bahwa sejarah dimotori oleh manusia dan alam. Terdapat perubahan sosial yang dituntut oleh keinginan manusia. Terdapat pula perubahan sosial yang dituntut oleh keinginan alam semesta. Kelompok masyarakat yang hidup di garis khatulistiwa mungkin bisa saja bertahan hidup dengan tanpa berpakaian di luar rumah. Namun, bagi kelompok masyarakat yang hidup jauh dari garis khatulistiwa tidak akan mampu bertahan hidup di luar rumah tanpa pakaian.

Namun kedua kelompok ini masing-masing memiliki kekuatan sekaligus kelemahannya masing-masing. Kelompok yang hidup di garis khatulistiwa mungkin memiliki waktu yang lebih banyak untuk melakukan interaksi dengan para tetangga, sehingga relasi sosial lebih kuat. Begitu juga bagi kelompok masyarakat di luar garis khatulistiwa karena tidak mampu bertahan di luar rumah, memiliki daya cipta yang kuat. Barangkali, itu yang menjadikan negara-negara Eropa dan Barat dapat menguasai teknologi bedil, kuman, dan baja. Atau yang melatarbelakangi fenomena kapitalisme global.

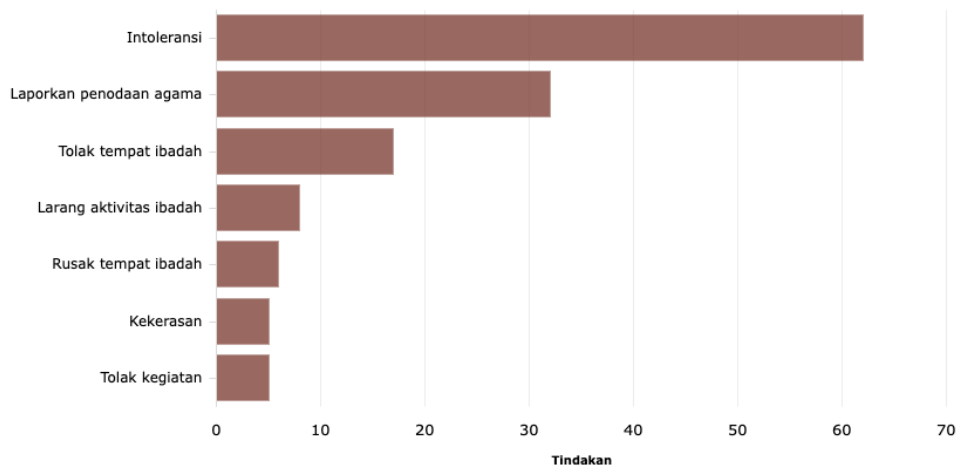
Bagaimanapun, perubahan sosial merupakan suatu keniscayaan yang harus dihadapi oleh manusia sebagai makhluk sosial. Setiap perubahan yang terjadi merupakan suatu pertanda sejarah yang mengikat dan merekam jejak kehidupan manusia. Namun tidak semua perubahan sosial yang hingga sejauh ini dialami oleh manusia memiliki implikasi yang secara terus menerus menguntungkan bagi kehidupan manusia (kesejahteraan maupun keadilan).

Pandangan mengenai masyarakat dan Islam tentu sangat luas, kita akan mempersempit pandangan ini dengan mulai melihatnya dari fenomena yang berawal

dari masjid. Masjid bagi umat Islam bukan semata-mata fasilitas peribadatan yang berbentuk bangunan megah. Terdapat nilai yang tersembunyi yang mampu mengikat masyarakat muslim ke dalam ikatan sosial, ikatan emosional hingga ke ikatan ketuhanan. Sebagai contoh Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 tentang aturan penyelenggaraan ibadah selama wabah virus corona berlangsung, menerapkan penutupan fungsi masjid sebagai tempat beribadah secara jamaah di era Pandemi Covid-19 yang terjadi di Kota Padang, terdapat sejumlah penolakan terhadap peraturan penutupan masjid dari para jamaah bahkan terjadi konflik antara masyarakat dan pemerintah.<sup>1</sup> Hal ini menunjukkan bagaimana masjid memiliki hubungan emosional yang kuat dengan masyarakat.

Peristiwa-peristiwa kekerasan yang melibatkan masjid bukanlah hal baru di Indonesia. Terdapat sejumlah peristiwa yang menggambarkan bagaimana masjid yang seharusnya sebagai tempat yang aman dan nyaman justru secara tidak kasat mata dapat melahirkan kekerasan. Pada tanggal 3 Maret 2011, Gubernur Jawa Barat mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2011 tentang pelarangan Kegiatan jamaah Ahmadiyah di Jawa Barat. Dalam pers gunernur menyatakan dengan mengeluarkan beberapa pernyataan terkait Ahmadiyah yang mengacu pada Perbug tersebut: (1) seluruh atribut Ahmadiyah yang terpasang di masjid harus segera dicopot dan masjid yang dulunya disebut Masjid Ahmadiyah akan dinyatakan sebagai masjid bersama yang boleh digunakan oleh kaum muslimin; (2) jemaat Ahmadiyah harus mau menerima pembinaan untuk menghentikan penyimpangan penafsiran aktivitas Jemaat Ahmadiyah berupa kegiatan penyebaran penafsiran dan aktivitas yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam maka wajib melaporkan kepada aparat kepolisian.<sup>2</sup>

7 Tindakan Pelanggaran Kebebasan Beragama Terbanyak Dilakukan Aktor Non-Negara (2020)



Dkatadata.co.id

databoks

<sup>1</sup> Baca, Firma, T.B., 2020, *Normal Baru dalam Praktik Keagamaan Islam pada Masa Pandemi di Kota Padang*. Al-Adyan: Journal of Religious Studies, 1 (2) 2020. h. 144-162

<sup>2</sup> Djelantik, S., dkk, 2013. *Terorisme dan Kekerasan Berlatar Belakanag Agama di Jawa Barat*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Katolik Prahyanan Bandung. hal. 55.

Sebanyak 442 tindakan pelanggaran keagamaan telah terjadi di Indonesia pada tahun 2020. Dari sekian jumlah tersebut, terdapat 184 tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aktor non-negara (kelompok warga, individu, dan ormas). adapun jenis pelanggaran keagamaan yang paling banyak dilakukan oleh aktor tersebut berupa intoleransi (62 tindakan), kemudian penodaan agama (32 tindakan), penolakan tempat ibadah (17 tindakan), dan pelarangan aktivitas ibadah (8 tindakan).<sup>3</sup>

Perilaku buruk apapun yang mengatasnamakan perintah agama, sebenarnya butuh untuk dikaji ulang. Dengan begitu agama dapat tidak selalu digunakan sebagai alasan untuk menjadikan orang lain menderita. kekerasan dalam perilaku dan tindakan mencerminkan keyakinan dan watak pelakunya. menurut Isnaeni (2014) hal ini muncul didasarkan pada pemahaman atas doktrin dan keyakinan dalam diri. upaya memberangus pihak lain atas alasan kesalahan dan kemaksiatan mestinya didekati melalui cara hikmah dan toleransi. Perbedaan cara pandang terhadap sesuatu tidak boleh menjadi dasar perilaku kekerasan.<sup>4</sup>

Pelajaran penting yang dapat kita ungkapkan selama pengalaman panjang menghadapi pandemi Covid-19 di Indonesia yang hingga kini sudah mendekati 2 tahun yaitu cara masyarakat meletakkan agama dalam persoalan publik. Masyarakat muslim Indonesia tidak sedikit yang memisahkan kepentingan publik dan kepentingan agama, seolah keduanya selalu terpisah. Semestinya kekerasan berbasis agama dapat dihindari dengan cara tidak memisahkan urusan publik dengan urusan agama. Sebab agama Islam adalah bagian dari solusi persoalan publik.

Persoalan lain yang juga menjadi sebab munculnya kekerasan atas nama agama dapat diidentifikasi melalui perbedaan pemahaman masyarakat terkait nilai agama Islam. Faktor ini dapat muncul dari keragaman latar belakang kepercayaan masyarakat, ormas yang diikuti, bahkan kecenderungan terhadap kepercayaan pada tokoh agama tertentu. Hal ini dapat dilihat dari banyak fenomena kekerasan agama yang terjadi di Indonesia. Namun, bagi Syukron (2017) secara komprehensif dan integratif perbedaan dalam bentuk pemahaman keagamaan bisa juga menjadi kekuatan membangun kebersamaan guna mencapai tujuan ketuhanan serta kemajuan umat manusia. Sayangnya, kekuatan itu (pada banyak kasus) hanya difungsikan untuk merusak serta penyingkiran terhadap orang lain; hal-hal tersebut sangat mudah digunakan oleh para pemimpin serta tokoh masyarakat, agama, politik, dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Dengan itu, agaknya, sentimen (*ghirabi*) keagamaan bisa dijadikan kendaraan yang paling ideal untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Pendekatan pemberdayaan masyarakat yang paling dilakukan dalam hal menangani persoalan sosial keagamaan ialah dengan mengarusutamakan kepentingan publik yang berpotensi menimbulkan kerugian masyarakat kolektif. Seperti halnya yang terjadi ketika Covid-19 mewabah di Indonesia, Tipologi berpikir

---

<sup>3</sup> Andrea Lidwana, 2021, *Intoleransi, Pelanggaran Kebebasan Beragama Terbanyak Dilakukan Aktor Non-Negara*, Setara Institute.

<sup>4</sup> Ahmad Isnaeni, 2014, *Kekerasan Atas Nama Agama*, Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam, Vol. 8, No. 2 (2014). h. 213-228



masyarakat dibentuk oleh sesuatu yang dapat merugikan banyak orang; antara kepercayaan bahwa wabah datangnya dari Allah dan akan dihilangkan hanya jika berdoa dengan kepercayaan masyarakat akan sains dan teknologi. Kedua hal ini sebenarnya tidak menjadi bagian dari masalah, baik agama maupun sains adalah sebuah *sunatullah* (hukum Allah) yang tidak dapat dihindari. Namun masalah tidak pada hukumnya, melainkan pada pikiran masyarakat yang digiring oleh banyak hal.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Masjid bisa menjadi rumah perdamaian masyarakat jika saja masjid memiliki satuan aturan dan kesepakatan kolektif dan inklusif terkait dengan pencegahan kekerasan berbasis agama. Kekuatan ada di masjid sejauh ini sering ditutupi oleh kekuatan ekonomi semata (jumlah zakat, infak, maupun sedekah), padahal kekuatan lainnya yang tidak kalah penting, seperti solidaritas jamaah (kolektif). Solidaritas jamaah hanya dapat dimunculkan jika masyarakat muslim membentuk satu kesepakatan untuk melawan potensi-potensi kekerasan yang ada. Hal ini dapat dimulai dari membuat kajian-kajian terkait masalah sosial, analisis kausalitas, mengkaji fatwa-fatwa perdamaian, melatih kader-kader ulama atau ustadz yang berpikir nir-kekerasan.

Masjid bagi umat Islam bukan semata-mata fasilitas peribadatan yang berbentuk bangunan megah. Terdapat nilai yang tersembunyi yang mampu mengikat masyarakat muslim ke dalam ikatan sosial, ikatan emosional hingga ke ikatan ketuhanan. Hal ini dapat kita lihat pada Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 tentang aturan penyelenggaraan ibadah selama wabah virus corona berlangsung, menerapkan penutupan fungsi masjid sebagai tempat beribadah secara jamaah di era Pandemi Covid-19 yang terjadi di Kota Padang, terdapat sejumlah penolakan terhadap peraturan penutupan masjid dari para jamaah bahkan terjadi konflik antara masyarakat dan pemerintah. Hal ini menunjukkan bagaimana masjid memiliki hubungan emosional yang kuat dengan masyarakat. Namun sayangnya kekuatan tersebut seharusnya dapat digunakan sebaliknya.

Kajian pada artikelnya ini masih sebatas *literature review* sehingga hasil yang dapat dimunculkan pada penelitian ini tidak dapat dikatakan selesai. Peluang akan penelitian lebih lanjut masih terbuka sangat lebar, sehingga peneliti mengharapkan dan menunggu masukan dan saran yang berguna bagi penelitian berikutnya.

## REFERENSI

- Agus Salim. *Perubahan Sosial: Sketsa Teori Dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002.
- Andrea Lidwana, 2021, *Intoleransi, Pelanggaran Kebebasan Beragama Terbanyak Dilakukan Aktor Non-Negara*, Setara Institute.

- Ahmad Isnaeni, 2014, Kekerasan Atas Nama Agama, Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam, Vol. 8, No. 2 (2014). h. 213-228
- Ahmad Zainul Hamdi,, —Klaim Religious Authority dalam Konflik Sunni-Syi'i Sampang Madurall, ISLAMICA. Vol. 6, No. 2, Maret 2012.
- Budhy Munawar Rachman, Membela Kebebasan Beragama, Jakarta: LSAF dan Paramadina, 2002.
- Djelantik, S., dkk, 2013. Terorisme dan Kekerasan Berlatar Belakang Agama di Jawa Barat.
- Firma, T.B., 2020, Normal Baru dalam Praktik Keagamaan Islam pada Masa Pandemi di Kota Padang. Al-Adyan: Journal of Religious Studies, 1 (2) 2020. h. 144-162
- Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Katolik Prahyanan Bandung
- Tim Penyusun, Laporan Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan dan toleransi,(Jakarta: the Wahid Institute, 2010.